

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya dalam penegakkan hukum di laut adalah pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan di Indonesia. Kapal yang memenuhi syarat-syarat laik laut yang dapat berlayar di wilayah laut di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Rentetan kecelakaan yang terjadi belakangan ini menjadi pemicu pemerintah dalam melakukan langkah-langkah positif untuk memperketat sistem dan prosedur dalam pemeriksaan kapal agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Sikap pemerintah demikian jelas terkait dengan desakan masyarakat yang menginginkan perbaikan, karena masyarakat sudah lelah dengan segala bentuk kelalaian dan lemahnya sistem yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemeriksaan kapal yang menjadi tulang punggung dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal perlu lebih dipertegas sehingga bagi pemilik kapal tidak lagi dapat berkelit dengan alasan kekurangan kapal. Perbaikan dan perawatan kapalnya yang dilakukan dengan tepat waktu merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan keselamatan pelayaran

Dalam upaya peningkatan keselamatan angkutan laut ini, pemeriksaan (conditional survey) harus dilaksanakan pada setiap kapal pada umumnya, namun khususnya untuk kapal berusia 20 tahun ke atas harus diberi perhatian yang lebih besar lagi, karena ternyata mayoritas kapal yang mengalami musibah kecelakaan adalah kapal-kapal yang berusia berkisar seperti tersebut di atas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Perhubungan Laut menunjukkan bahwa 27,4 %

kapal yang mengalami kecelakaan adalah kapal yang dibangun antaran tahun 1975-1980, kemudian diikuti oleh kapal dengan tahun pembangunan 1971-1975 sebesar 18,9% dan yang dibangun pada tahun 1981-1985 sebesar 13,4 %

Pelabuhan merupakan tempat pemberhentian (terminal) kapal setelah melakukan pelayaran Di pelabuhan ini kapal melakukan berbagai kegiatan seperti menaik turunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, melakukan reparasi, melakukan perbekalan dan sebagainya. Untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut pelabuhan harus dilengkapi dengan fasilitas pemecah gelombang, dermaga, peralatan tambat, peralatan bongkar muat barang, gudang-gudang, lapangan penumpukan barang, perkantoran baik untuk pengolahan pelabuhan maupun maskapai pelayaran, ruang tunggu bagi penumpang, perlengkapan pengisian bahan bakar.

Pelabuhan Tanjung Buton merupakan pelabuhan yang melayani kegiatan antar pulau, dimana letak Pelabuhan Tanjung Buton berada sungai apit (Riau) dengan jarak tempuh ke pelabuhan Telaga Punggur (Batam) kurang lebih adalah Sekitar 18 jam 267.0 km atau 1441,68 5 mil laut, kunjungan kapal ke pelabuhan Tanjung Buton tiap tahunnya mengalami peningkatan dengan ukuran kapal antara : 12 GT sampai 30.000 GT dimana dapat dilihat dari tabel kunjungan kapal 5 tahun terakhir. Aliran sungai apit yang membawa lumpur dan mengendap di sungai apit dan berfungsi sebagai alur pelayaran menyebabkan pendangkalan/sedimentasi. Untuk menjaga kedalaman alur pelayaran supaya kapal-kapal yang masuk/keluar pelabuhan aman dan lancar, diperlukan adanya kegiatan pengerukan alur pelayaran/perawatan (maintenance) yang diusulkan ke pemerintah pusat melalui dan APBN.

Keberadaan pelabuhan Tanjung Buton kelas II mempunyai peranan penting dalam mendorong perekonomian daerah khususnya di kabupaten Siak disaat dilihat dari banyaknya industri yang berkembang khususnya perikanan antara lain industri pengolahan ikan, tempat penyimpanan ikan (coold storage) dan mobilitas kendaraan roda empat, Keberadaan pelabuhan tanjung buton juga menjadi akses penyeberangan, barang dan jasa kegiatan bongkar peti kemas sehingga dari kegiatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan membantu

program pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan adanya kunjungan kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan dan melakukan kegiatan bongkar/muat barang antar pulau, ekspor dan impor cangkang dapat menambah devisa negara

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2018 menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional. Pelayaran mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri yang perlu dikembangkan dengan memperhatikan sifatnya yang padat moda, sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik didalam negeri maupun dari luar negeri, oleh karenanya, permasalahan keselamatan dan keamanan dalam pelayaran merupakan tanggung jawab besar yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut, tentunya pemerintah mempunyai peran penting yang menunjang kelancaran pelayaran melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton adalah Unit pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton adalah instansi pemerintah dibawah direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah, peraturan, pengendalian, pengawasan kegiatan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil di Pelabuhan Tanjung Buton sesuai KM. 36 tahun 2012 tentang kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Tugas pokok

Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton melaksanakan pemberian pelayanan melalui lintas angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut

Sesuai regulasi, setiap kapal barang atau penumpang harus menjalani perbaikan dan perawatan sekali dalam setahun. Perawatan ringan reguler kapal biasanya dibutuhkan waktu selama 1- 2 minggu, sedangkan perawatan berat dibutuhkan waktu 2-3 minggu, bahkan bisa membutuhkan waktu satu bulan. Untuk itu setiap pengusaha angkutan pelayaran seharusnya mendukung upaya peningkatan keselamatan pelayaran oleh karena setiap kapal harus menjalani perbaikan dan perawatan. Kebijakan pemerintah dalam menghapus toleransi terhadap pemeriksaan kapal hendaknya dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran itu sendiri

Peran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam operasi ro-ro sungai selari ke Batam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan baik dari manajemen Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton, dan perusahaan-perusahaan pelayaran di dalam lingkup Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton itu sendiri, untuk itu prosedur kegiatan lalu lintas angkutan laut harus benar-benar dilaksanakan dan ditangani secara lebih profesional agar aktifitas lalu lintas angkutan laut dan keselamatan pelayaran di dalam lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berjalan lancar.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah khususnya tentang peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton dalam Operasi Roro Sungai selari ke Batam sehingga dapat mengatasi kendala-kendala dengan tepat, aman, efektif, dan efisien, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan mengambil judul **“Peran Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton Dalam Operasional Kapal Roro Sungai Selari-Batam”**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Buton dalam Operasional kapal Roro Sungai Selari-Batam.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Tanjung Buton dalam Operasional Kapal Roro Sungai Selari-Batam dan bagaimana penanganannya

1.2.2 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penyusunan Tugas akhir yang telah ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program diploma III (D-III) maka kegunaan dari penulisan Tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi / Perusahaan, penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan selama ini oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Buton.
2. Agar Penulis lebih mengetahui secara mendalam tentang peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Buton dalam Operasional Roro Sungai Selari ke Batam.
3. Hasil Tugas Akhir ini dapat penulis sumbangkan sebagai dokumentasi di perpustakaan untuk dibaca oleh seluruh civitas Politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Kemaritiman.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton dalam Operasional kapal Roro Sungai Selari-Batam di pelabuhan Sungai Pakning?
2. Apa saja Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton dalam Operasional kapal Roro Sungai Selari-Batam?

1.4 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian Tugas akhir ini adalah tentang Peran Kesayahbandaran dan Otoriatas Pelabuhan kelas II Tanjung Buton dalam Operasional Kapal Roro Sungai Selari ke Batam.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut :

HALAMAN SAMPUL

TANDA PENGESAHAN

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK (INDONESIA)

ABSTRACT (INGGRIS)

KATA PENGANTAR

DAFTER ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- 1.3 Perumusan Masalah
- 1.4 Pembatasan Masalah

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI / TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.2 Study Penelitian Terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.3 Teknik Analisis Data

3.4 Jadwal Penelitian / Rencana Kegiatan Penelitian

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.2 Analisis Data

4.3 Alternatif Perumusan Masalah

4.4 Evaluasi Perumusan Masalah

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

